

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA

Wildan Arifianto

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Surabaya
E-mail : hirimayoichi555@gmail.com

Imam Setiyono

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik non-parametris Spearman Rank. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan adalah positif dan signifikan, dan hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kusnetz. Faktor penyebabnya adalah rendahnya tingkat pendidikan, teknologi, dan faktor institusional yang masih buruk.

Kata Kunci : pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan

ABSTRACT

This study examines the effect of economic growth on income distribution in Indonesia. The purpose of this study was to identify the effect of economic growth on income distribution in Indonesia. This research is descriptive with quantitative approach. The method of analysis used in this study is a non-parametric statistical Spearman Rank method. From the data analysis it can be concluded that the effect of economic growth on income distribution is positive and significant, and it is not in accordance with the theory put forward by Kusnetz. Contributing factor is the low level of education, technology, and institutional factors that are still bad.

Keywords : economic growth, income distribution

PENDAHULUAN

Permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan penghapusan kemiskinan. Di beberapa negara tujuan tersebut kadang-kadang menjadi sebuah dilema antara mementingkan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan (Deininger dan Olinto, 2000). Pertumbuhan yang tinggi belum tentu memberi jaminan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan akan rendah. Banyak Negara Sedang Berkembang (NSB) yang mempunyai pertumbuhan ($\pm > 7\%$ /tahun), tetapi tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan dan kemiskinannya juga tinggi. Hal ini menimbulkan tuntutan untuk lebih mementingkan pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan daripada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan adalah dua hal yang sedang gencar-gencarnya ditekan pertumbuhannya oleh pemerintah. Ketidakmerataan terkait erat dengan kemiskinan karena secara mendasar adalah indikator kemiskinan relatif, yaitu kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Rendahnya ketidakmerataan, atau semakin meratanya distribusi pendapatan, tentunya merupakan salah satu agenda penting pembangunan ekonomi.

Jika melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia, pada 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari PDB Indonesia dalam Laporan Perekeonomian Indonesia 2011 yang dipublikasikan oleh BI melalui situs resminya. Dalam tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Data terbaru yaitu pada tahun 2011, PDB Indonesia mencatatkan angka pada 6,5 %. Diantara Negara-negara sekawasan,

Indonesia adalah Negara yang memiliki PDB tertinggi pada tahun 2011.

Jika ditinjau dari segi kesejahteraan, pada tahun 2011 BI melaporkan bahwa kesejahteraan penduduk Indonesia meningkat dengan menurunnya prosentase penduduk miskin. Prosentase penduduk miskin menunjukkan angka 13,33% pada tahun 2010 dan menjadi 12,36% pada tahun 2011. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian Indonesia yang membaik, upah minimum yang meningkat, nilai tukar petani yang baik, dan tingkat inflasi yang terjaga. Namun, penurunan penduduk miskin pada tahun laporan lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara antar daerah, tingkat kemiskinan masih tinggi di daerah luar Jakarta. Selama tahun 2011, kemiskinan tertinggi berada di wilayah Sumatera Selatan dan wilayah Bali Nusa Tenggara, seiring dengan lambatnya inflasi di kawasan-kawasan tersebut. BI juga mengemukakan bahwa kesenjangan pendapatan penduduk miskin semakin berkurang dengan menurunnya Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada tahun 2010, indeks ini menunjukkan angka 2,21 dan pada tahun 2011 sebesar 2,05.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pengurangan tingkat kesenjangan ekonomi rakyat Indonesia harus menjadi prioritas pemerintahan ke depan. Saat membuka sidang kabinet paripurna, SBY menekankan bahwa pengurangan kemiskinan dan kesenjangan dapat dilakukan dengan kebijakan pemerintah dan kepemimpinan daerah yang tepat (Kuncoro, www.kompas.com). Data yang ada menunjukkan, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat di Indonesia, ternyata ketidakmerataan pendapatan yang diukur dengan indeks Gini juga meningkat, tetapi kemiskinan cenderung menurun. Dengan kata lain, semakin tinggi pertumbuhan, memang jumlah dan tingkat kemiskinan cenderung menurun, tetapi kesenjangan antara si kaya dan si miskin cenderung kian lebar saat pertumbuhan semakin meningkat di Indonesia selama periode 2000-2012.

Masalah kesenjangan ini dalam praktek sering memicu kecemburuan sosial dan kekerasan yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Sumber daya alam yang melimpah seharusnya memberikan kesejahteraan masyarakat jika regulasi berpihak kepada rakyat. Namun, yang terjadi sebaliknya, kesenjangan terjadi di mana-mana. Misalnya, di daerah yang miskin dan APBD-nya rendah, para pejabat dan kepala dinas mengendarai mobil mewah dan tinggal di perumahan mewah.

Tak ketinggalan, para kontraktor sebagai mitra kerja PEMDA juga ikut menampilkan gaya hidup mewah di tengah kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Belum lagi perusahaan-perusahaan yang

mengeksploitasi alam secara besar-besaran di daerah, masyarakat di sekitarnya hanya bisa menjadi penonton sehingga mendorong munculnya kecemburuan sosial, kesenjangan, dan berujung pada tindak kekerasan.

Aspek kesenjangan ekonomi dan indikator ekonomi untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi antara lain dengan melihat Indeks Gini (Gini Ratio). Ironisnya indeks Gini tercatat mengalami peningkatan, jika pada 2010 hanya 0,38, pada 2011 menjadi 0,41, dan pada 2013 diperkirakan mendekati koefisien 0,5. Padahal, indeks Gini merupakan indikator tingkat distribusi pendapatan yang ditunjukkan dengan koefisien nol hingga satu, yang artinya semakin tinggi koefisien, kian tidak merata distribusi pendapatan penduduk. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa tingkat distribusi pendapatan menunjukkan adanya ketidakmerataan yang hampir mendekati setengah parah di saat perekonomian dikatakan dalam angka terlihat cukup baik.

Pandangan tradisional tentang distribusi berpendapat bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan necessary condition dan insentif yang baik bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Argumen dasarnya bahwa pendapatan yang tinggi pengusaha dan perorangan akan menaikkan tabungan, tabungan yang tinggi akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi (Djojohadikusumo, 1994). Setelah itu baru mekanisme trickle down effect berjalan, dengan melalui program perpajakan dan subsidi. Pengalaman di negara-negara maju trickle down effect terjadi dalam waktu yang lama. Sedangkan kondisi distribusi pendapatandi NSB menghendaki penyelesaian masalah secepatnya, untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Argumen ini yang menyebabkan meluasnya penumpukan kekayaan para elit penguasa.

Menurut Myrdal proses pembangunan ekonomi yang berlangsung di tiap negara menghasilkan hubungan sirkuler yang menyebabkan si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin. Backwash effect (dampak balik) cenderung lebih besar daripada spread effect (dampak sebar) (Jhingan, 1996). Peranan kekuatan pasar bebas dan perdagangan bebas menghambat potensi ekspor negara terbelakang, sehingga memperparah export gap. Ketidakmerataan distribusi internasional dan ketidakmerataan distribusi regional, bisa menghambat pertumbuhan ekonomi NSB yang berdampak semakin kecilnya pendapatan perkapita.

Pandangan berbeda diberikan oleh Todaro: "...why greater equality in developing countries may in fact be condition for self-sustaining economic growth" (Todaro, 2000). Dari kutipan Todaro dapat disimpulkan bahwa semakin besar pemerataan maka hal itu dapat menjadi insentif yang baik bagi negara yang sedang berkembang untuk membangun perekonomiannya.

Pendapat Todaro ini berdasarkan beberapa argumen sebagai berikut: 1) Pemerataan pendapatan akan meningkatkan akses masyarakat terhadap kredit, pembiayaan sekolah, dan asuransi; 2) Berdasarkan data di NSB kemampuan menabung dan berinvestasi ke dalam negeri orang-orang kaya rendah; 3) Pemerataan akan meningkatkan taraf hidup serta produktivitas kerja; 4) Pemerataan akan meningkatkan daya beli masyarakat; 5) Pemerataan akan meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan. Dengan pemerataan distribusi pendapatan yang baik dapat mengurangi permasalahan-permasalahan sosial ekonomi, bahkan dapat dijadikan modal untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.

Dalam kondisi pasar modal yang tidak sempurna (capital market imperfection) hubungan antara human capital dengan distribusi pendapatan maupun aset mempunyai trade off pada kemampuan investasi individu pada pembentukan sumber daya manusia (human capital). Pada penduduk miskin yang tak punya akses pada capital market, maka akan kesulitan untuk mendapatkan dana untuk membiayai investasi pada human capital maupun untuk kegiatan produksi (Bardhan dan Udhry, 1999).

Pembagian distribusi pendapatan di Indonesia semakin tidak merata. Hal tersebut tampak dari semakin meningkatnya Indeks Gini Indonesia. Sebagaimana diketahui, indeks Gini mengukur distribusi pendapatan suatu negara. Besarnya indeks Giniantara 0 (nol) sampai 1 (satu), indeks Gini sama dengan 0 (nol) menunjukkan besarnya indeks bahwa distribusi pendapatan merata sempurna, sementara indeks Gini sama dengan 1 (satu) menunjukkan distribusi pendapatan sama sekali tidak merata. Berdasarkan data, indeks Gini Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2005 besarnya indeks Gini adalah 0,32, maka pada tahun 2008 meningkat menjadi 0,35, dan kembali meningkat menjadi 0,41 pada tahun 2011. Bahkan saat pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2012 yaitu dari 6,5% menjadi 6,3%, indeks Gini Indonesia tidak mengalami penurunan yaitu tetap 0,41.

Hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pendapatan perlu mendapatkan perhatian. Permasalahan yang lebih penting yaitu mengidentifikasi jalur (channels) yang menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghasilkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pendapatan. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh tiap negara berbeda-beda, tergantung dari ciri masing-masing negara yang bersangkutan.

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi adanya permasalahan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan. Permasalahan yang akan dibahas dan dijawab yaitu apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap distribusi pendapatan di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan masyarakat yang ada di Indonesia.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Dalam teori pertumbuhan mereka, dimisalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan kepada teori pertumbuhan ekonomi klasik, dikemukakan suatu teori yang menjelaskan perkaitan di antara pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan teori penduduk optimum. Teori pertumbuhan klasik dapat dilihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marjinal adalah lebih tinggi daripada pendapatan per kapita. Akan tetapi apabila penduduk semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marjinal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya.

Teori pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith

"An Inquiry into the nature and causes of the wealth of the nation", teorinya yang dibuat dengan teori the *invisible hands* (Arsyad, 2010). Teori Pertumbuhan ekonomi Adam Smith ditandai oleh dua faktor yang saling berkaitan yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total. Pertumbuhan output yang akan dicapai dipengaruhi oleh 3 komponen berikut ini.

1. Sumber-sumber alam

Sumber alam diintrepetasikan oleh ketersediaan tanah. Menurut Smith, sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan "batas maksimum" bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Artinya jika sumber daya alam ini belum digunakan secara maksimal atau sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan modal yang ada akan terus memacu pertumbuhan output. Namun, pertumbuhan ini akan terhenti apabila

jika semua sumber daya yang ada sudah digunakan secara optimal.

2. Tenaga kerja (pertumbuhan penduduk)

Tenaga kerja diintrepetasikan oleh jumlah penduduk. SDM memegang peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Smith memandang tenaga kerja merupakan salah satu input (masukan) dalam proses produksi dan pembagian kerja, dan spesialisasi merupakan salah satu kunci penting dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja

3. Akumulasi modal yang dimiliki.

Jumlah persediaan modal memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Persediaan modal dapat diidentikkan sebagai “dana pembangunan”, cepat lambatnya pembangunan ekonomi tergantung pada ketersediaan “dana pembangunan” tersebut. Selain itu persediaan modal merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Peranannya sangat sentral dalam pertumbuhan output. Jumlah dan pertumbuhan output ini tergantung pada laju pertumbuhan persediaan modal.

Ketersediaan modal tergantung pada jumlah tabungan masyarakat. Sementara jumlah tabungan masyarakat tergantung pada “pola kepemilikan modal” dari masyarakat tersebut. Smith memandang hanya para tuan tanah dan pengusaha yang mempunyai kemampuan untuk menabung, karena mereka adalah kaum “pemilik modal”.

Teori pertumbuhan ekonomi David Ricardo dan T.R Malthus

Menurut Ricardo faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar hingga menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Pendapat Ricardo ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Malthus, yang menyatakan bahwa makanan (hasil produksi) akan bertambah menurut deret hitung (satu, dua, dan seterusnya). Sedangkan penduduk akan bertambah menurut deret ukur (satu, dua, empat, delapan, enam belas, dan seterusnya) sehingga pada saat perekonomian akan berada pada taraf subsisten atau kemandegan.

Ricardo menggunakan beberapa asumsi untuk membahas pertumbuhan ekonomi yaitu : 1. Jumlah tanah terbatas; 2. Tenaga kerja akan meningkat atau menurun tergantung pada tingkat upah nominal; 3. Akumulasi modal terjadi jika keuntungan yang diperoleh para pemilik modal berada diatas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka untuk melakukan

investasi; 4. Kemajuan teknologi terjadi sepanjang waktu; 5. Sektor pertanian sangat dominan. (Arsyad, 2010).

Dengan terbatasnya tanah, maka pertumbuhan penduduk akan menurunkan produk marginal yang kemudian kita kenal dengan istilah hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang (The Law of Diminishing Return). Selama tenaga kerja yang dipekerjakan pada tanah tersebut bisa menerima tingkat upah diatas tingkat upah alamiah, jumlah penduduk (tenaga kerja) akan terus bertambah. Hal tersebut akan menurunkan lagi produk marginal tenaga kerjanya dan pada gilirannya akan menurunkan tingkat upah. Proses yang dijelaskan diatas akan berhenti apabila tingkat upah nominal turun sampai pada tingkat alamiah, jumlah penduduk (tenaga kerja) akan menurun.

Akibatnya tingkat penawaran atas tenaga kerja akan mendorong tingkat upah untuk mengalami kenaikan sampai pada tingkat upah alamiah. Pada posisi ini jumlah penduduk konstan, jadi dari segi faktor produksi tanah dan tenaga kerja, ada suatu kekuatan dinamis yang akan selalu mendorong perekonomian ke arah tingkat upah minimum yaitu berlakunya hukum kenaikan hasil yang semakin menurun.

Peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi akan cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dengan kata lain, dapat memperlambat terjadinya The Law of Diminishing Return yang pada gilirannya akan memperlambat pula penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal.

Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik

Teori pertumbuhan Neo-klasik melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari segi penawaran. Menurut teori ini, yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi (Arsyad, 2010). Dalam persamaan, pandangan ini dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

Dimana :

ΔY adalah tingkat pertumbuhan ekonomi

ΔK adalah tingkat pertumbuhan modal

ΔL adalah tingkat pertumbuhan penduduk

ΔT adalah tingkat pertumbuhan teknologi

Analisis solow selanjutnya membentuk formula matematis untuk persamaan itu dan seterusnya membuat pembuktian secara kajian empiris untuk menunjukkan kesimpulan berikut: faktor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah pertambahan modal dan pertambahan tenaga kerja. Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.

Teori pertumbuhan ekonomi Sollow-Swan

Menurut teori Sollow-Swan, pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Berdasarkan penelitiannya, Sollow (1956) menyatakan bahwa peran dari kemajuan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi sangat dominan. Temuan Sollow menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang mencapai 2,75% per tahun pada periode 1909 sampai 1949, lebih dari setengahnya (1,5%) merupakan sumbangan dari kemajuan teknologi, sedangkan sisanya disebabkan oleh pertambahan jumlah penggunaan faktor produksi. (Arsyad, 2010).

Teori Pertumbuhan Ekonomi dalam perspektif ekonomi Kelembagaan

Dalam tradisi ekonomi kelembagaan, sumber pertumbuhan ekonomi tidak harus bertumpu pada investasi semata, meskipun disadari bahwa faktor tersebut juga penting. Bahkan, jika teknologi merupakan faktor yang given pertumbuhan ekonomi tetap bisa dilakukan. Pertumbuhan ekonomi tanpa adanya perubahan tingkat teknologi inilah yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi kasus statis (static case) (Yustika, 2008). Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan jalan melakukan spesialisasi atau pembagian kerja. Efisiensi dan produktivitas tidak harus dilakukan dengan menambah sumber daya maupun mengubah teknologi yang menurut teori klasik merupakan faktor penentu pertumbuhan ekonomi, namun cukup dengan melakukan dan mempraktikkan pembagian kerja (spesialisasi).

Kemudian terdapat teori pertumbuhan ekonomi pendekatan dinamis : perubahan teknologi. Dalam hal ini peran utama kelembagaan adalah mendesain aturan yang membuat perusahaan mempunyai insentif untuk dapat melakukan proses “perusahaan kreatif”, pada akhirnya berimplikasi kepada penemuan teknologi baru dan memicu pertumbuhan ekonomi. Namun dalam kasus Negara berkembang, peningkatan teknologi sangat bergantung kepada Negara maju, sehingga NSB semakin terperosok. Sehingga jalan satu-satunya adalah meningkatkan anggaran untuk research and development melalui pendidikan (Yustika, 2008).

Teori Distribusi Pendapatan

Hipotesis U Terbalik Tentang Ketidakmerataan : Teori Kuznets

Banyak perhatian yang telah diberikan terhadap bagaimana distribusi pendapatan berubah dalam masa pembangunan. Simon Kuznets (1955) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*) bahwa mula-

mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan semakin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan semakin merata (Kuncoro, 1997).

Menurut Kuznets “pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya”. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan-kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Kuznets pada tahun 1971 juga mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010), diantaranya sebagai berikut:

1. Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
2. Tingkat kenaikan produktivitas faktor total yang tinggi.
3. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi.
4. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.
5. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.
6. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia.

Berdasarkan hipotesis tersebut, muncul pertanyaan: kenapa terjadi suatu trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan dan untuk berapa lama? Atau berdasarkan kerangka pemikiran yang melandasi “hipotesis Kuznets”, apakah memang terbukti ada suatu korelasi positif jangka panjang setelah beberapa tahun antara tingkat pendapatan per kapita (atau laju pertumbuhan) dan tingkat pemerataan dalam distribusi pendapatan atau suatu korelasi antara tingkat pendapatan per kapita dan besarnya ketidakmerataan distribusi pendapatan? Atau, kalau memang benar relasi antara peningkatan pendapatan rata-rata per kapita (yang mencerminkan semakin tingginya tingkat pembangunan ekonomi) dan tingkat distribusi pendapatan berbentuk “kurva U terbalik”, sesuai hipotesis Kuznets, apakah tidak mungkin ketidakmerataan akan membesar lagi (muncul kurva U terbalik, kedua).

Evolusi ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan pada awalnya didominasi oleh apa yang disebut hipotesis Kuznets. Dengan memakai data antar Negara (cross-section) dan data dari sejumlah survey/observasi disetiap sektor (time series), Kuznets

menemukan relasi antara distribusi pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita berbentuk U terbalik. Hasil ini diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari suatu ekonomi pedesaan (rural) ke suatu ekonomi perkotaan (urban) atau ekonomi. Pada awal proses pembangunan, ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan naik sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi, pada akhir proses pembangunan, ketidakmerataan menurun, yakni pada saat sektor-sektor di daerah perkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar dari tenaga kerja yang berasal dari pedesaan (sektor pertanian) atau pada saat pangsa pertanian lebih kecil di dalam produksi dan penciptaan pendapatan.

Beberapa pendapat dari hasil studi empiris yang menguji hipotesis Kuznets, dengan menggunakan data makro dari sejumlah negara sebagian besar studi-studi tersebut mendukung hipotesis Kuznets, sedangkan sebagian lainnya menolak, misalnya, Deininger dan Squire (1996) tidak menunjukkan adanya suatu relasi yang sistematis antara pertumbuhan pendapatan dan pola distribusinya. Walaupun hipotesis itu diterima, namun sebagian besar dari studi-studi tersebut menunjukkan bahwa relasi positif antara pertumbuhan dan pemerataan pada periode jangka panjang hanya terbukti nyata untuk kelompok negara-negara industri maju (kelompok Negara-negara dengan tingkat pendapatan yang tinggi).

Hasil studi tersebut di atas harus ditanggapi dengan kritis karena pendekatan *cross-section* study mempunyai sejumlah kelemahan, diantaranya adalah pendekatan tersebut tidak memasukkan pengaruh-pengaruh terhadap perkembangan distribusi pendapatan di masing-masing negara secara individu. Misalnya, di suatu negara mungkin saja tingkat distribusi pendapatan (yang diukur dengan indeks Gini) pada periode sebelumnya (periode $t=0$) sangat berpengaruh terhadap tingkat ketidakmerataan distribusi atau pertumbuhan pendapatan pada saat ini ($t=1$). Dengan menggunakan data *time series* mengenai indeks Gini yang di dapat dari 486 observasi dari 45 negara berkembang dan maju untuk periode 1947-1993 oleh Deininger dan Squire (1996), hasil plot antara indeks Gini pada dekade 1970-an dan indeks Gini pada dekade 1980-an dan 1990-an menunjukkan adanya suatu korelasi yang positif.

Kemudian pendekatan *cross-section analysis* lainnya. Misalnya Anand dan Kanbur (1993) yang mengkritik hasil analisis Ahluwalia (1976) yang mendukung hipotesis Kuznets (Anand dan Kanbur. 1993. *The Kuznets Process and The Inequality-Development Relationship*. Journal of Development Economics 40. 255-2. North-Holland, (Online)(<http://unoacademia.ch/webdav/site/developpem>

ent/users/Natascha_Wagner/public/anand_kanbur93.pdf, diakses 7 Juni 2013).

Menurut mereka, distribusi pendapatan tidak bisa dibandingkan antar negara karena konsep pendapatan unit populasi dan cakupan surveinya berbeda. Mereka juga mengkritik metode yang digunakan Ahluwalia dalam analisisnya yang berkaitan dengan variasi dalam *functional form*: bentuk fungsi yang berbeda (diantara mana data tidak dapat dipilih) dapat mengakibatkan bentuk relasi yang berbeda antara ketidakmerataan distribusi dan tingkat pendapatan. Hasil ulang analisis yang dilakukan oleh Anand dan Kanbur (1993) dengan memakai data dari 60 negara yang sama seperti pada studi Ahluwalia (1976) menolak hipotesis Kuznets.

Sedangkan studi-studi dengan pendekatan analisis *time-series* hanya sebagian yang mendukung kurva Kuznets, misalnya dari Ravallion dan Datt (1996) (dalam Arsyad, 2010), mengenai India dengan menggunakan logaritma (log) jumlah produk domestik (dalam nilai riil) per orang (1951=0) sebagai proksi dari pendapatan per kapita dan indeks Gini sebagai proksi dari tingkat ketidakmerataan distribusi. Studi ini menunjukkan bahwa selama periode 1950 hingga awal dekade 1990-an pendapatan rata-rata per kepala meningkat dan kecenderungan perkembangan tingkat ketidakmerataan distribusi ekonomi menunjukkan sudut yang negatif (menurun). Distribusi pendapatan sebagai suatu ukuran dibedakan menjadi dua ukuran pokok, baik untuk tujuan analisis maupun untuk tujuan kuantitatif (Todaro, 2000) yaitu:

- Distribusi pendapatan "personal" atau distribusi pendapatan berdasarkan ukuran atau besarnya pendapatan. Distribusi pendapatan pribadi atau distribusi pendapatan berdasarkan besarnya pendapatan paling banyak digunakan ahli ekonomi. Distribusi ini hanya menyangkut orang per orang atau rumah tangga dan total pendapatan yang mereka terima, dari mana pendapatan yang mereka peroleh tidak dipersoalkan. Tidak dipersoalkan pula berapa banyak yang diperoleh masing-masing individu, apakah merupakan hasil dari pekerjaan mereka atau berasal dari sumber-sumber lain. Selain itu juga diabaikan sumber-sumber pendapatan yang menyangkut lokasi (apakah di wilayah desa atau kota) dan jenis pekerjaan.
- Distribusi pendapatan "fungsional" atau distribusi pendapatan menurut bagian faktor distribusi. Sistem distribusi ini mempertimbangkan individu-individu sebagai totalitas yang terpisah-pisah

Teori Distribusi Pendapatan Kaldor

Menurut Kaldor (Prayitno, 1996) ada dua kelompok dalam masyarakat, yaitu kelompok kapitalis dan kelompok buruh. Masing-masing kelompok mempunyai propensity to save (s) yang berbeda : s_p untuk kelompok kapitalis dan s_w untuk kelompok buruh, dan kita anggap bahwa $s_p > s_w$ (sebenarnya penentuan kelompok ini tidaklah harus antara golongan kapitalis dan buruh seperti yang dilakukan oleh Kaldor, tetapi bisa berdasarkan ciri-ciri sosio ekonomis yang lain, misal : kelompok penduduk perkotaan dan kelompok penduduk pedesaan atau kelompok sektor industri dan kelompok sektor pertanian dan sebagainya). Yang penting adalah kedua kelompok tersebut mempunyai propensity to save yang berbeda. Seluruh pendapatan nasional (Q) oleh kedua kelompok tersebut pembagiannya

$$P + W = Q$$

Dimana :

P = keuntungan atau penghasilan dari kelompok kapitalis

W = upah atau penghasilan dari kelompok buruh

Tabungan masyarakat total biasa dinyatakan sebagai :

$$S = s_p P + s_w W$$

Pesamaan tersebut kalau dibagi dengan Q, dan dengan mengingat bahwa

$$W = Q - P$$

Maka :

$$\frac{S}{Q} = s_p \frac{P}{Q} + s_w \frac{Q - P}{Q}$$

Atau

$$S = (s_p - s_w) \frac{P}{Q} + s_w Q$$

P/Q menunjukkan berapa bagian dari pendapatan masyarakat (pendapatan nasional) yang diterima oleh kelompok kapitalis, yang sering disebut profit share.

Jadi dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa propensity to save masyarakat secara keseluruhan (s) adalah kombinasi dari propensity to save dari masing-masing kelompok (s_p, s_w) dan profit share (yang menunjukkan pola distribusi pendapatan antar kedua kelompok tersebut). Syarat bagi warranted of growth adalah :

$$Sh = \left[(s_p - s_w) \frac{P}{Q} + s_w h \right]$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa meskipun s_p, s_w dan h adalah koefisien yang mempunyai nilai konstan, namun warranted of growth tidak hanya mempunyai satu nilai tapi berkisar antara x % dan y %. Nilai dimana dalam batas-batas ini yang nantinya

merupakan warranted of growth tergantung pada pola distribusi pendapatan yang berlaku, yang ditunjukkan oleh profit share (P/Q). Warranted of Growth biasa berkisar antara s, w, h (apabila P/Q = 0) dan s, p, h (apabila P/Q = 1).

Jadi dalam model Kaldor pola distribusi pendapatan mempunyai frekuensi terhadap laju pertumbuhan ekonomi apabila $s_p > s_w$, maka semakin besar profit share semakin tinggi pula laju pertumbuhan ekonomi. Ini berarti bahwa semakin tidak merata pula distribusi pendapatan, semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi. Model Kaldor menunjukkan akan adanya "Trade off" atau pilihan antara pertumbuhan GDP yang cepat tetapi dengan distribusi pendapatan yang tidak merata, atau pertumbuhan GDP yang lambat tetapi dengan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Myrdal (dalam Jhingan, 1996) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik (backwash effect) cenderung membesar dan dampak sebar (spread effect) cenderung mengecil. Secara kumulatif kecenderungan ini semakin memperburuk ketidakmerataan internasional dan menyebabkan ketidakmerataan regional di antara negara-negara terbelakang.

Myrdal juga menjelaskan bahwa asal ketidakmerataan regional dalam suatu negara berakar pada dasar non-ekonomi. Ketidakmerataan regional berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Penyebab gejala ini menurut Myrdal ialah peranan bebas kekuatan pasar, yang cenderung memperlebar dari pada mempersempit ketidakmerataan regional.

Myrdal mengatakan:

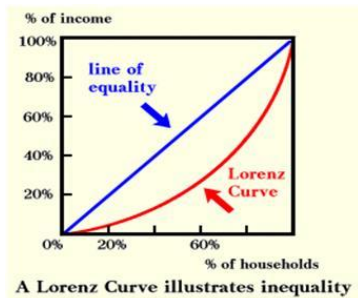
"Jika segala sesuatu diserahkan pada kekuatan pasar tanpa dirintangi oleh intervensi kebijaksanaan apa pun maka produksi, industri, perdagangan, perbankan, asuransi, perkapalan dan hampir semua kegiatan ekonomi yang cenderung mendatangkan keuntungan pada umumnya akan mengelompok di daerah atau di wilayah tertentu saja dan meninggalkan daerah-daerah lain di negara tersebut tetap terbelakang (Myrdal dalam Jhingan, 1996).

Ukuran distribusi pendapatan

Kurva Lorenz

Cara lain untuk menganalisis distribusi pendapatan perorangan adalah membuat kurva yang disebut kurva Lorenz. Dinamakan kurva Lorenz adalah karena yang memperkenalkan kurva tersebut adalah Conrad Lorenz

seorang ahli statistik dari Amerika Serikat. Pada tahun 1905 ia menggambarkan hubungan antara kelompok-kelompok penduduk dan pangsa (*share*) pendapatan mereka.



Gambar 1 Kurva Lorenz (Arsyad, 2010 hal 289)

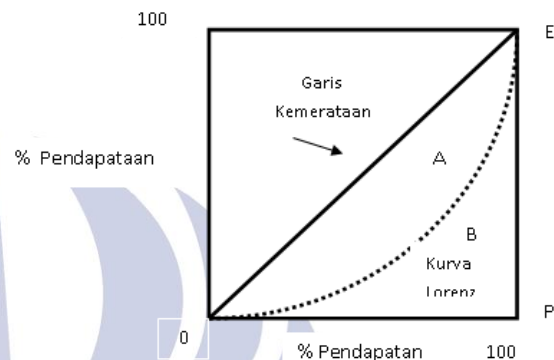
Sumbu vertikal menunjukkan pangsa pendapatan yang diterima oleh masing-masing prosentase jumlah penduduk. Jumlah ini juga kumulatif sampai 100 persen, dengan demikian kedua sumbu itu sama panjangnya dan akhirnya membentuk bujur sangkar. Sebuah garis diagonal kemudian digambarkan melalui titik origin menuju sudut kanan atas dari bujur sangkar tersebut. Setiap titik pada garis diagonal tersebut menunjukkan bahwa prosentase pendapatan yang diterima sama persis dengan prosentase penerima pendapatan tersebut. Sebagai contoh, titik tengah dari diagonal tersebut betul-betul menunjukkan bahwa 50 persen pendapatan diterima oleh 50 persen jumlah penduduk.

Demikian juga titik 75 atau 25. Dengan kata lain, garis diagonal tersebut menunjukkan distribusi pendapatan dalam keadaan pemerataan sempurna (*perfect equality*). Oleh karena itu garis tersebut bisa juga disebut sebagai garis pemerataan sempurna tersebut. Jumlah pendapatan digambarkan pada sumbu horizontal, tidak dalam angka mutlak tetapi dalam prosentase kumulatif. Misalnya, titik 20 menunjukkan 20 persen penduduk termiskin (paling rendah pendapatannya), dan pada titik 60 menunjukkan 60 persen penduduk terbawah pendapatannya, dan pada ujung sumbu horizontal merupakan jumlah 100 persen penduduk yang dihitung pendapatannya.

Semakin jauh kurva Lorenz tersebut dari garis diagonal (kemerataan sempurna), semakin tinggi derajat ketidakmerataan yang ditunjukkan. Keadaan yang paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna, misalnya keadaan dimana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, akan ditunjukkan oleh berhimpitnya kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan.

IndeksGini

Suatu ukuran yang singkat mengenai derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu negara biasa diperoleh dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal (kemerataan sempurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dari separuh bujur sangkar dimana terdapat kurva Lorenz tersebut. Koefisien Gini itu ditunjukkan oleh perbandingan antara daerah yang diarsir dengan luas segitiga OPE.



Gambar 2 Perkiraan Koefisien Gini (Arsyad, 2010 hal 290)

Secara matematis rumus koefisien Gini adalah sebagai berikut. Pada gambar, Kurva Lorenz memetakan kumulatif pendapatan pada sumbu vertikal dengan kumulatif penduduk pada sumbu horizontal. Pada contoh, 40 persen penduduk menguasai sekitar 20 persen total pendapatan. Koefisien Gini diperoleh dengan membagi luas daerah A dengan (A+B).

Jika setiap individu memiliki pendapatan yang sama, maka kurva distribusi pendapatan akan tepat jatuh pada garis lurus 45 derajat pada gambar, dan koefisien Gini bernilai 0. Sebaliknya jika seorang individu menguasai seluruh pendapatan, dikatakan terjadi ketidakmerataan sempurna (maksimum) sehingga kurva distribusi pendapatan akan jatuh pada titik (0,0), (0,100) dan (100,100), dan angka koefisien Gini bernilai 1 (Arsyad, 2010).

Koefisien Gini dihitung sbb

$$G = \frac{A}{(A+B)} = 1 - 2B$$

$$G = 1 - 2 \int_0^1 L(x) dx$$

(karena A+B = 0,5) atau untuk fungsi probabilitas diskret f(y) dengan y_i, i dari 1 sampai n, adalah titik-titik diurutkan dari kecil ke besar (increasing):

$$G = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n f(y_i)(S_{i-1} - S_i)}{S_n}$$

di mana

$$S_i = \sum_{j=1}^i f(y_j)y_j \text{ dan } S_0 = 0$$

Pada praktek, fungsi $L(x)$ maupun $f(y)$ tidak diketahui, hanya ada titik koordinat dalam interval. Sehingga koefisien Gini dihitung menggunakan rumus:

$$G_1 = 1 - \sum_{k=1}^n (X_k - X_{k-1})(Y_k + Y_{k-1})$$

di mana:

X_k = kumulatif proporsi populasi

Y_k = kumulatif proporsi income/pendapatan

Y_k diurutkan dari kecil ke besar

Nilai G_1 di sini adalah perkiraan dari nilai G .

Koefisien Gini ini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat dan nilainya terletak antara 0 (kemeraan sempurna) sampai 1 (ketidakmerataan sempurna). Koefisien Gini dari negara-negara yang mengalami ketidakmerataan tinggi berkisar antara 0,50 – 0,70; ketidakmerataan sedang berkisar antara 0,36 – 0,49; dan yang mengalami ketidakmerataan rendah berkisar antara 0,20 - 0,35 (Arsyad, 2010).

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan dari segi teori ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut, ada dua pandangan tentang hubungan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Salah satu pandangan mendukung bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketidakmerataan distribusi pendapatan, sedangkan pandangan lain mengemukakan sebaliknya. Secara garis besar dua pandangan tersebut yaitu :

Pandangan yang menolak pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan:

Teori Karl Mark (1787). Mark berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahap awal pembangunan akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Kenaikan tingkat upah dari tenaga kerja selanjutnya berpengaruh terhadap kenaikan resiko kapital terhadap tenaga kerja sehingga terjadi penurunan terhadap permintaan tenaga kerja. Akibatnya timbul masalah pengangguran dan ketidakmerataan pendapatan. Singkatnya, pertumbuhan ekonomi cenderung mengurangi masalah kemiskinan dan distribusi pendapatan hanya pada tahap awal pembangunan, kemudian pada tahap selanjutnya akan terjadi sebaliknya (Irawan, 2002).

Neo Marxist menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi justru akan selalu menyebabkan melebarnya jurang ketidakmerataan antara si kaya dan si miskin. Hal ini terjadi karena adanya akumulasi modal dan kemajuan teknologi yang cenderung meningkatkan konsentrasi penguasaan sumber daya dan kapital oleh para penguasa modal kelompok “elit” masyarakat. Sebaliknya non-

pemilik modal akan tetap berada dalam keadaan kemiskinan.

Pandangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan:

Menurut Kuznets seorang ekonom klasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara miskin pada awalnya cenderung menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Namun bila negara-negara miskin tersebut sudah semakin maju, maka persoalan kemiskinan dan distribusi pendapatan akan menurun (*an inverse U shaped pattern*).

Para ekonom klasik (Roberti, 1974), Hayani dan Ruffan (1985), mengemukakan pertumbuhan ekonomi akan selalu cenderung mengurangi kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan walaupun masih dalam tahap awal pertumbuhan. Bukti empiris dari pandangan ini berdasarkan pengamatan di beberapa negara seperti Taiwan, Hongkong, Singapura, RRC. Kelompok Neo klasik sangat optimis bahwa pertumbuhan ekonomi pada prakteknya cenderung mengurangi ketidakmerataan pendapatan dan kemiskinan (Irawan, 2002).

Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain : Studi yang dilakukan oleh Waluyo (2004) dengan judul “Hubungan Antara Tingkat Ketimpangan Distribusi pendapatan Dengan Pertumbuhan Ekonomi : Suatu Studi Lintas Negara “. Hasil dari studi ini adalah (1) Hubungan antara distribusi pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi adalah negatif dan signifikan. (2) Investasi tidak memperbaiki redistribusi pendapatan, tetapi memperbaiki redistribusi kepemilikan tanah dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya ekonomi.

Berikutnya adalah studi yang dilakukan Wahyuni (2004) dengan judul “*Is There A Link Between Increased Growth And Reduced Income Inequality? Analysis Of Cross-Country Studies*”. Hasil temuannya adalah hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan pendapatan mempunyai hubungan yang negatif artinya jika pertumbuhan ekonomi naik maka ketidakmerataan pendapatan akan turun.

Lalu studi yang dilakukan oleh Yuliani (2011) dengan judul “Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Distribusi Pendapatan (Studi Kasus 35 Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah 2007-2008)”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah masih tergolong rendah yaitu sebesar 0,28 pada tahun 2007 dan tahun 2008 . Dengan menggunakan diagram tipologi empat kuadran diketahui bahwa beberapa kabupaten/kota di

Jawa Tengah cenderung tergolong kedalam kategori ketidakmerataan distribusi pendapatan rendah dengan pertumbuhan ekonomi rendah dan pendapatan perkapita rendah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Parhah dengan judul “Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi pendapatan Di Indonesia”. Hasil penelitiannya adalah inflasi dan *tax ratio* mempunyai efek progresif terhadap distribusi pendapatan, sedangkan tingkat pengangguran, pengeluaran pembangunan, dan PDRB perkapita mempunyai efek regresif terhadap distribusi pendapatan. Variabel dummy yang digunakan untuk melihat perubahan pola distribusi pendapatan sebelum dan setelah krisis juga signifikan mempengaruhi distribusi pendapatan.

Dan yang terakhir adalah studi yang dilakukan oleh Sutarno, dan Mudjarat Kuncoro, 2000 dengan judul “Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Kecamatan Di Kabupaten Banyumas, 1993-2000”. Berdasarkan hasil analisis pada periode pengamatan 1993-2000, terjadi kecenderungan peningkatan ketidakmerataan, baik dianalisis dengan indeks Williamson maupun dengan indeks entropi Theil. Ketidakmerataan ini salah satunya diakibatkan konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial. Hipotesis Kuznets mengenai ketidakmerataan yang berbentuk kurva U terbalik berlaku di Kabupaten Banyumas, ini terbukti dari hasil analisis trend dan korelasi Pearson. Hubungan antara pertumbuhan dengan indeks Williamson dan entropi Theil untuk kasus Kabupaten Banyumas selama periode 1993-2000 terbukti berlaku hipotesis Kuznets.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel independen adalah pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel dependen adalah distribusi pendapatan di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dan rasio indeks Gini di Indonesia sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah : Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2000-2012. Rasio Indeks Gini Indonesia tahun 2000-2012.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis uji statistik non-parameteris korelasi Spearman Rank. Karena sumber data untuk kedua variabel yang akan dikonversikan dapat berasal dari sumber yang tidak sama,

jenis data yang dikorelasikan adalah data ordinal, serta data dari kedua variabel tidak harus membentuk distribusi normal. Jadi korelasi Spearman Rank bekerja dengan data ordinal atau berjenjang atau ranking dan bebas distribusi. Rumus untuk menganalisis korelasi Spearman Rank adalah sebagai berikut :

$$\rho = 1 - \frac{6\sum b_1^2}{n(n^2 - 1)}$$

Dimana ρ adalah koefisien korelasi Spearman Rank.

Untuk menguji signifikansi dapat digunakan pula rumus sebagai berikut :

$$Z_h = \frac{\rho}{\frac{1}{\sqrt{n-1}}}$$

Dimana Z_h : Nilai Signifikansi

ρ : Koefisien Korelasi Spearman Rank

n : Banyak Data

jika $Z_h > Z_t$ maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima dan sebaliknya. Lalu untuk melihat koefisien determinasi (R^2) maka nilai rho tersebut dikuadratkan (ρ^2) setelah itu dikalikan dengan 100% maka akan diketahui tingkat prosentase korelasinya.

Setelah melalui pengujian hipotesis dan hasilnya signifikan, (H_0 ditolak), maka untuk menentukan keeratan hubungan bisa digunakan kriteria Guilford (1956) (dalam Sugiyono, 2010) yaitu :

1. kurang dari 0,20 : Hubungan yang sangat kecil dan bisa diabaikan
2. 0,20 - < 0,40 : Hubungan yang kecil (tidak erat)
3. 0,40 - < 0,70 : Hubungan yang cukup erat
4. 0,70 - < 0,90 : Hubungan yang erat (reliabel)
5. 0,90 - < 1,00 : Hubungan yang sangat erat (sangat reliabel)
6. 1,00 : Hubungan yang sempurna

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum menunjukkan trend yang positif selama beberapa kurun waktu terakhir. Hal itu ditunjukkan dari terus meningkatnya PDB Indonesia dari tahun ke tahun. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi nasional lebih stabil dibanding negara Tiongkok dan India, sekalipun pertumbuhan ekonomi dua negara tersebut dari sisi angka jauh lebih besar dibanding Indonesia. Tidak hanya stabil, perekonomian Nasional juga tumbuh berkelanjutan. Berdasarkan data Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan

(Kemenkeu), dari rata-rata pertumbuhan selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi RI lebih stabil dan berkelanjutan dibanding negara-negara lain, termasuk Tiongkok dan India (Dorimulu dan Gloria. 2013. <http://www.investor.co.id>).

Tabel 1 Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini Indonesia

Tahun	Pertumbuhan ekonomi (%)	Indeks Gini (0-1)
2000	4.9	0.29
2001	3.6	0.32
2002	4.5	0.33
2003	4.8	0.32
2004	5.1	0.32
2005	5.7	0.36
2006	5.5	0.36
2007	6.3	0.37
2008	6.1	0.35
2009	4.5	0.37
2010	6.1	0.38
2011	6.5	0.41
2012	6.3	0.41

Sumber :Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2012)

Stabilnya ekonomi Nasional tercermin pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis finansial global 2009 atau sejak 2010 hingga 2013. Pada 2010, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 6,1%, berlanjut ke 6,5% pada 2011. Bahkan, pada 2012 dan 2013, perekonomian nasional tetap stabil, dengan pertumbuhan lebih dari 6%. Pertumbuhan ekonomi tahun lalu mencapai 6,3%. Dalam kondisi perekonomian global yang masih lemah tahun ini, ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh setidaknya 6,2%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terbukti lebih stabil dibanding delapan negara lain, yakni Tiongkok, India, Kolombia, Brasil, Kosta Rika, Rusia, Thailand, dan Meksiko. Bahkan, dari sisi deviasi pertumbuhannya, Indonesia paling rendah, hanya 0,9% pada periode 2000-2010, dibanding negara-negara lain seperti Portugal, Norwegia, Prancis, Selandia Baru, Belgia, Swiss, Kanada, dan India, yang deviasinya lebih dari 1%.

Meski dari sisi angka pertumbuhan Indonesia masih nomor tiga setelah Tiongkok dan India, dalam lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional jauh lebih stabil dan berkelanjutan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan India dalam lima tahun terakhir masing-masing mencapai 10,5% dan 8,1%. Sedangkan Indonesia rata-rata pertumbuhannya 5,9%.

Distribusi pendapatan Indonesia

Dari tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa dalam periode 2002 – 2010, secara umum terdapat kecenderungan

distribusi pendapatan yang semakin tidak merata yang ditunjukkan oleh indeks Gini ratio Indonesia yang meningkat dari 0,33 pada tahun 2002 menjadi 0,36 pada tahun 2008.

Masalah ketidakmerataan ini dalam praktek sering memicu kecemburuan sosial dan kekerasan yang sering terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Sumber daya alam yang melimpah seharusnya memberikan kesejahteraan masyarakat jika regulasi berpihak kepada rakyat. Namun yang terjadi sebaliknya, kesenjangan terjadi di mana-mana. Misalnya, di daerah yang miskin dan APBD-nya rendah, para pejabat dan kepala dinas mengendarai mobil mewah dan tinggal di perumahan mewah. Tidak ketinggalan, para kontraktor sebagai mitra kerja PEMDA juga ikut menampilkan gaya hidup mewah di tengah kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Belum lagi perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi alam secara besar-besaran di daerah, masyarakat di sekitarnya hanya bisa menjadi penonton sehingga mendorong munculnya kecemburuan sosial, kesenjangan, dan berujung pada tindak kekerasan

Ketidakmerataan dalam studi empiris, ada dua jenis ketidakmerataan yang menjadi pusat perhatian. Pertama, distribusi pendapatan antar golongan yang diukur dengan indeks Gini dan berapa kue Nasional yang dinikmati 40 persen golongan pendapatan terendah. Ketidakmerataan yang meningkat diukur dengan distribusi pendapatan yang makin lebar sebagaimana tercermin dari rasio Gini yang meningkat dari 0,33 (2002) ke 0,41 (2011) (Kuncoro. 2012. www.bisniskeuangan.kompas.com).

Ironisnya, penurunan kue Nasional yang dinikmati kelompok 40 persen penduduk termiskin justru diikuti kenaikan kue nasional yang dinikmati 20 persen kelompok terkaya dari 42,2 persen (2002) menjadi 48,42 persen (2011). Sementara kelompok 40 persen penduduk menengah mengalami penurunan kue nasional dari 36,9 persen (2002) menjadi 34,7 persen (2011). Ternyata ada indikasi kuat terjadi *trickle-up effect*, efek muncrat ke atas, dalam proses pembangunan Negara kita. Kedua, ketidakmerataan antar daerah penting untuk diteliti karena gravitasi aktivitas ekonomi Indonesia masih cenderung terkonsentrasi secara geografis ke kawasan barat Indonesia (KBI) selama lebih dari lima dasawarsa terakhir. Betapa tidak, data BPS hingga triwulan IV 2012 menunjukkan, struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih didominasi kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar 57,5 persen, diikuti Pulau Sumatera sekitar 23,9 persen. Kawasan timur Indonesia (KTI) hanya sebagian sisanya, sekitar 18,6 persen. Dengan kata lain, ketidakmerataan antar wilayah dan pulau terus terjadi.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian semakin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.

Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan "output perkapita". Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat

Distribusi pendapatan

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau tidaknya pembagian hasil suatu negara dikalangan penduduknya. Untuk mengukur ketidakmerataan distribusi pendapatan, bisa menggunakan Kurva Lorenz atau Indeks Gini. Koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat dan nilainya terletak antara 0 (kemertataan sempurna) sampai 1 (ketidakmerataan sempurna). Koefisien Gini dari negara-negara yang mengalami ketidakmerataan tinggi berkisar antara 0,50-0,70; ketidakmerataan sedang antara 0,36-0,49; dan yang mengalami ketidakmerataan rendah berkisar antara 0,20-0,35. (Arsyad, 2010)

Indikator tersebut merupakan indikator tingkat ketidakmerataan yang paling umum digunakan dan diumumkan oleh negara-negara di dunia. Adapun interval nilai koefisien Gini adalah dari 0 sampai dengan 1. Nilai koefisien Gini yang semakin mendekati 0 menunjukkan perekonomian yang tingkat ketidakmerataannya semakin rendah atau semakin merata, sementara nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan tingkat ketidakmerataan yang semakin tinggi. Adapun nilai koefisien Gini yang menembus tingkat 0,4 secara internasional dipandang sebagai batas peringatan di mana tingkat ketidakmerataan dinilai mulai membahayakan (Meisari, 2012. www.fairinstitute.org) yaitu berpotensi meningkatkan kecemburuan sosial yang dapat memicu konflik sehingga mengancam stabilitas nasional.

Tabel 2 Tabel pembantu perhitungan Spearman Rank

Tahun	Pertumbuhan ekonomi	Indeks Gini	Ranking (X _i)	Ranking (Y _i)	(X _i - Y _i) b _i	b _i ²
2000	4.9	0.29	9	13	-4	16
2001	3.6	0.32	13	11	2	4
2002	4.5	0.33	11.5	9	2.5	6.25
2003	4.8	0.32	10	11	-1	1
2004	5.1	0.32	8	11	-3	9
2005	5.7	0.36	6	6.7	-0.7	0.49
2006	5.5	0.36	7	6.7	0.3	0.09
2007	6.3	0.37	2.5	4.5	-2	4
2008	6.1	0.35	4.5	8	-3.5	12.25
2009	4.5	0.37	11.5	4.5	7	49
2010	6.1	0.38	4.5	3	1.5	2.25
2011	6.5	0.41	1	1	0	0
2012	6.3	0.41	2.5	1	1.5	2.25
Jumlah						106.58

$$\rho = 1 - \frac{6\sum b_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

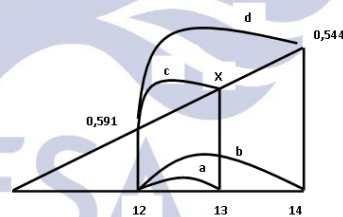
$$\rho = 1 - \frac{6 \times 106.58}{13(13^2 - 1)}$$

$$\rho = 1 - \frac{639.48}{2184}$$

$$\rho = 1 - 0,293$$

$$\rho = 0,707$$

Untuk menginterpretasikan angka ini maka perlu dibandingkan dengan harga kritik rho. Karena untuk n=13 tidak ada dalam harga kritik rho maka dapat dicari dengan interpolasi berdasarkan taraf kesalahan 5% untuk n=12 harga rho 0,579 dan untuk n=14 harga rho 0,544.



Gambar 3 Interpolasi Nilai Rho

Dari gambar tersebut dapat dibuat persamaan untuk mencari harga kritik X, yang merupakan rho pada n = 13.

Jadi persamaannya :

$$a : b = c : d$$

$$(13-12):(14-12)=(X-0,591):(0,544-0,591)$$

$$1 : 2 = (X-0,591) : -0,047$$

$$2X - 2(0,591) = 1(-0,047)$$

$$2X = 1,182 - 0,047$$

$$2X = 1,135$$

$$X = 0,5675$$

Jadi harga kritik ρ untuk n=13 dengan taraf kesalahan 5% adalah 0,5675. Dari perhitungan ρ hitung = 0,707. Harga ini ternyata lebih besar dari harga kritik ρ (0,707 > 0,5675) dengan demikian H_0 yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap

distribusi pendapatan (dilihat dari rasio indeks Gini) di Indonesia ditolak dan ha diterima. Jadi kesimpulannya pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap distribusi pendapatan (dilihat dari rasio indeks Gini) di Indonesia.

Untuk menguji signifikansi dapat digunakan pula rumus z sebagai berikut :

$$Z_h = \frac{\rho}{\frac{1}{\sqrt{n} - 1}}$$

$$Z_h = \frac{0,701}{\frac{1}{\sqrt{13} - 1}}$$

$$Z_h = \frac{0,707}{\frac{1}{\sqrt{n} - 1}}$$

$$Z_h = 2,45$$

Untuk taraf kesalahan 5%. Harga kritik Z_t , Z dicari pada $Z_{0,5-(0,5-0,05)} = Z_{0,475}$ diperoleh dari harga 1,96. Hal ini berarti $Z_h > Z_t$, ($2,45 > 1,96$) sehingga hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima

Nilai determinasi :

$$R^2 = \rho^2 \times 100\%$$

$$R^2 = 0,707^2 \times 100\%$$

$$R^2 = 0,4998 \times 100\%$$

$$R^2 = 49,98\%$$

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan di Indonesia

Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap distribusi pendapatan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari uji statistik non-parametris, yaitu uji korelasi Spearman Rank. Dari uji tersebut dapat dilihat bahwa nilai ρ hitung $> \rho$ kritik ($0,707 > 0,5676$) sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi pendapatan di Indonesia dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dengan asumsi ceteris paribus.

Dari hasil uji signifikansi uji Z ($Z_h > Z_t$) didapatkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap distribusi pendapatan dan dari koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 49,98%, berarti bahwa 49,98% distribusi pendapatan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi selebihnya sebesar 50,02% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pula ketidakmerataan distribusi

pendapatan. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kuznest. Menurut Kuznets, ketidakmerataan distribusi pendapatan hanya akan terjadi pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, namun dalam jangka panjang hal itu akan teratasi atau menurun seiring berjalannya waktu dan kematangan perekonomian. Hal ini ternyata tidak terjadi di negara kita ini.

Hal ini juga dikuatkan oleh hasil penelitian dari Anand dan Kanbur (1993) yang mengkritik hasil analisis Ahluwalia (1976) yang mendukung hipotesis Kuznets. Menurut mereka distribusi pendapatan tidak bisa dibandingkan antara negara satu dengan negara lain karena konsep pendapatan unit populasi dan cakupan surveinya berbeda. Mereka juga mengkritik metodologi yang digunakan Ahluwalia dalam analisisnya yang berkaitan dengan variasi dalam *functional form*: bentuk fungsi yang berbeda (di antara mana data tidak dapat dipilih) dapat mengakibatkan bentuk relasi yang berbeda antara ketidakmerataan distribusi dan tingkat pendapatan. Hasil ulang analisis yang dilakukan oleh Anand dan Kanbur (1993) dengan memakai data dari 60 negara yang sama seperti pada studi Ahluwalia (1976) menolakhipotesis Kuznets (Anand dan Kanbur. 1993. *The Kuznets Process and The Inequality-Development Relationship*. Journal of Development Economics 40. 25552. North-Holland, (Online) (http://unoacademia.ch/webdav/site/developpement/users/Natascha_Wagner/public/anand_kanbur93.pdf, diakses 7 Juni 2013).

Salah satu faktor yang menjadi penyebab teori Kuznets tidak berlaku adalah faktor kelembagaan. Menurut Myrdal (1957) terjadi proses divergen (menjauh) yang menyebabkan ketidakmerataan semakin melebar. Fenomena ini dijelaskan Myrdal sebagai akibat dari proses penyebab akumulatif (*cumulative causation/CC*). Myrdal (1957) menyebut adanya dampak kurang menguntungkan untuk menjelaskan fenomena meningkatnya ketidakmerataan antara negara maju dan negara berkembang. Ia berpendapat, *backwash effect* lebih besar daripada *Spread effect*.

Dampak penyebaran adalah dampak dari ekspansi di pusat kegiatan ekonomi ke daerah yang relatif tertinggal melalui kenaikan permintaan produk pertanian (misalnya bahan pangan), bahan baku, serta barang konsumsi yang dihasilkan industri kecil. Inilah yang minim terjadi di Indonesia karena: (1) produk pertanian dan industri masih banyak yang diimpor dari luar, (2) lemahnya keterkaitan antara usaha besar dan kecil. Teori Myrdal tentang CC tak menyangkal adanya kemungkinan proses konvergen (memusat atau terfokus) akibat dampak penyebaran. Penyebabnya adalah faktor-faktor "non-ekonomi" atau kelembagaan. Faktor non-ekonomi dan kelembagaan disini dapat dicontohkan dengan institusi

(aturan-aturan yang mengatur interaksi politik, ekonomi, dan sosial). Institusi terdiri dari aturan informal (adat istiadat, tradisi, norma sosial dan agama) dan aturan formal (konstitusi, undang-undang, peraturan-peraturan, dan hak kepemilikan). Misalnya institusi yang “korup” dan kebijakan (aturan) yang tidak pro-rakyat seperti kenaikan harga BBM yang cenderung memberatkan rakyat. Dalam ekonomi kelembagaan hak kepemilikan merupakan syarat bagi kelancaran transaksi ekonomi. Di negara kita peraturan yang mengatur hak kepemilikan tersebut masih minim, bahkan undang-undang yang menyatakan bahwa sektor-sektor strategis yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak seharusnya dimiliki negara malah menjadi milik pribadi atau swasta. Contohnya banyak BUMN yang diprivatisasi serta lahan pertanian dan perhutanan yang dijual kepada investor swasta untuk dijadikan lahan perkebunan pabrik.

Kemudian jika dilihat dari segi sosial budaya masyarakat Indonesia yang masih tradisional misalnya masyarakat yang minim pendidikan akan berfikir bahwa banyak anak banyak rezeki sehingga menambah laju pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya akan mengurangi lapangan pekerjaan yang tersedia. Karena itu, analisis proses pembangunan yang hanya menekankan faktor ekonomi menjadi kurang relevan karena faktor kelembagaan, historis, sosial, dan kultural juga berperan (Arsyad, 2010). Meski kinerja ekonomi pascakrisis cenderung membaik, indikator ketidakmerataan dan kemiskinan menunjukkan bukti adanya eksklusi sosial-ekonomi bagi kebanyakan manusia Indonesia.

Faktor kedua yaitu adalah subsidi yang tidak tepat sasaran dan korupsi. Pertumbuhan ekonomi dinilai berkualitas jika diikuti dengan menurunnya indeks Gini karena produk domestik bruto di negara itu dinikmati oleh semakin banyak warga, demikian pula sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2011 dalam catatan Badan Pusat Statistik mencapai 6,5 persen, sama dengan target pemerintah untuk tahun ini.

“Namun pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi di tengah kelesuan ekonomi dunia tersebut justru diikuti dengan naiknya koefisien Gini. Indeks Gini pada 2010 lalu adalah 0,38 sementara pada Maret 2011 naik menjadi 0,41 atau tertinggi sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia. Dalam kurun delapan tahun terakhir, indeks terendah dicapai pada 2004 yaitu 0,33. “Salah satu penyebab dari tingginya indeks Gini adalah subsidi yang tidak tepat sasaran, salah satunya adalah untuk bahan bakar minyak,” kata Bambang.

Bambang menjelaskan bahwa dalam kasus tersebut, orang kaya justru menikmati subsidi yang lebih besar karena mengkonsumsi bahan bakar minyak lebih

banyak dibanding orang miskin. Oleh karena itu pemerintah dalam keterangan Bambang sedang menyusun strategi yang tepat untuk mendistribusikan subsidi secara lebih tepat sasaran (Nunun. 2012. www.suarakarya-online.com).

Menurut Country Director ADB untuk Indonesia Jon D. Lindborg di Jakarta pertumbuhan ekonomi yang cepat menjadi penyebab utama dari peningkatan ketidakmerataan tersebut. Ketidakmerataan terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak diikuti dengan pemerataan pendidikan dan teknologi (Maesaroh. 2012. www.seputarindonesia.com).

Penyebab lain adalah minimnya akses ke lahan, modal dan pasar, tingkat urbanisasi yang tinggi serta ketidakseimbangan antara pekerja formal dan non-formal. Minimnya akses ke lahan dan modal akan menyebabkan masyarakat yang ingin berproduksi menjadi terhambat oleh banyak aturan misalnya kredit ketat dengan bunga tinggi. Di Indonesia pekerja non-formal jauh lebih banyak dari pekerja formal, urbanisasi yang tinggi dari desa ke kota akan menyebabkan penawaran tenaga kerja di kota akan meningkat tajam padahal sektor formal di kota belum tentu mampu menyerap seluruh penawaran tenaga kerja tersebut, sehingga pengangguran di kota akan meningkat dan kemudian akan meningkatkan kemiskinan serta ketidakmerataan pendapatan.

Laporan ADB menyebut 1% orang-orang terkaya di negara-negara Asia menyumbang 6%–8% total pendapatan negara dan hampir 20% pendapatan negara bersangkutan dinikmati 5% orang-orang berpendapatan tertinggi. Gambaran itu mempertegas sebuah ironi bahwa selama ini kue kekayaan hanya dikuasai segelintir orang tertentu. Tidak mengherankan bila melihat realitas orang miskin di Indonesia berjumlah sekitar 8 kali lipat penduduk Singapura, tetapi banyak orang kaya asal Indonesia yang membeli properti di Singapura.

Bahkan, selama 2010 tercatat 2,3 juta orang penduduk Indonesia mengunjungi Singapura hanya untuk berlibur. Sebaliknya, orang Singapura yang datang ke Indonesia dalam kurun waktu yang sama hanya belasan ribu orang. Jadi, pertumbuhan ekonomi yang eksklusif saat ini telah menjerumuskan jutaan penduduk Indonesia dalam jurang kemiskinan dan ketidakmerataan. Hanya sebagian kecil penduduk negeri ini yang menikmati tingginya pertumbuhan ekonomi.

SIMPULAN dan SARAN

Simpulan

Dari hasil analisis data didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap distribusi pendapatan di Indonesia. Pengaruhnya adalah positif dan signifikan, faktor penyebabnya adalah

subsidi yang salah sasaran, rendahnya pemerataan tingkat pendidikan dan penguasaan teknologi serta faktor kelembagaan seperti institusi yang “korup” dan kebijakan yang tidak pro-rakyat.

Saran

Peranan pemerintah dalam proses distribusi pendapatan seharusnya sangat dominan. Alternatif kebijakan yang mungkin dapat diambil antara lain: (1) Peningkatan pengenaan tarif pajak progresif. (2) Pajak pendapatan yang dipungut sebaiknya bersifat earmarked tax (Pajak yang dipungut untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tertentu yang sudah spesifik). dan dialokasikan untuk program distribusi pendapatan serta peningkatan pengawasan dalam proses pemungutan pajak sehingga tidak terjadi penyelewengan.

Pemerintah hendaknya tidak hanya mendorong investasi padat modal tanpa melihat lapangan pekerjaan yang tersedia. Pemerintah seharusnya lebih mendorong investasi padat karya sehingga mampu memberikan lapangan pekerjaan misalnya pembangunan jalan dan infrastruktur. Dengan tersedianya lapangan pekerjaan, maka diharapkan dapat mengurangi pengangguran dan menambah pendapatan masyarakat, sehingga ketidakmerataan dapat berkurang melalui jalur upah

Daftar Rujukan

- Ahluwalia, Montek S. 1976b. *Inequality, Poverty and Development. Journal of Development Economics* 3, 307-342 (Online), (www.planningcommission.gov.in/aboutus/speech/spears/msa010.pdf, diakses 7 Juni 2013)
- Anand, Shudir And S.M.R. Kanbur. 1993. *The Kuznets Process and The Inequality-Development Relationship. Journal of Development Economics* 40. 25552. North-Holland, (Online) (http://unoacademia.ch/webdav/site/developpement/users/Natascha_Wagner/public/anand_kanbur93.pdf, diakses 7 Juni 2013)
- Arsyad, Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Ed. 3. Yogyakarta: STIM YKPN
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi pembangunan*. Ed. 5. Yogyakarta : STIM YKPN
- Bardhan, Pranab dan Christopher Udry. 1999. *Development Microeconomics*, Oxford University Press, (online). (www.povertyactionlab.org/sites/default/files/documents/CUdry.pdf, diakses tanggal 9 Juni 2013)
- Boediono. 1982. *Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE
- Deininger, Klaus dan Squire, L. 1996. *Measuring Inequality: A New Data Base*. (Online). World Bank, (http://www.worldbank.org/research/growth/dddeisqu.htm, diakses tanggal 10 Juni 2013)
- Deininger, Klaus dan Olinto. Pedro. 2000. *Asset Distribution, Inequality And Growth*. (Online). Worldbank, (http://www.worldbank.org/inequal/index.htm, diakses tanggal 11 Juni 2013)
- Djojohadikusumo, Sumitro, 1994, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES
- Dorimulu, Primulus dan Elizabeth Gloria. 19 Mei 2013. *Ekonomi RI Lebih Stabil Dari Tiongkok Dan India*, (Online), (http://www.investor.co.id/home/ekonomi-ri-lebih-stabil-dari-tiongkok-dan-india/61121, Diakses tanggal 23 Juni 2013)
- Haeruman. 1996. *Pembangunan Daerah dan Peluang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah. No. Khusus 25 Tahun (1971-1996) Tahun XXV*. Jakarta : Prisma
- http://www.bps.go.id/aboutus.php?booklet=1 (Diakses tanggal 16 Juni 2013)
- http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=73832 (Diakses tanggal 20 Juni 2013)
- Kuncoro, Mudrajad. 15 Juni 2012. *Kuatkan Fondasi Ekonomi Kita*, (Online), (http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/06/15/03295989/twitter.com (Diakses tanggal 19 Juni 2013)
- Ikhsan, Moh. 1995. *Indikator-Indikator Makro Ekonomi*. Jakarta : Edisi 2 Lembaga : Penerbit FE UI.
- Irawan, M. Suparmoko. 2002. *Ekonomika Pembangunan Edisi ke 6*. Yogyakarta: BFE.
- Jhingan, ML. 1996. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : CV. Rajawali. (Terjemahan).
- Kuncoro, Mudrajad. 19 Juli 2013. *Mengurangi Ketidakmerataan*, (Online), (http://cetak.kompas.com/read/2013/03/02/02071484/mengurangi.ketidakmerataan (Diakses tanggal 22 Juli 2013)
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Erlangga

- Meisari, Dewi. 2013. *Perekonomian Indonesia: Tumbuh Gemilang, Namun Timpang*, (Online), <http://www.fair-institute.org/> (Diakses tanggal 22 Juni 2013)
- Maesaroh. 2012. *Ketidakmerataan Kesejahteraan Semakin Meningkat*, (Online), www.seputarindonesia.com, diakses tanggal 15 Juni 2013.
- Nunun. 6 September 2012. *Ekonomi Indonesia Belum Berkualitas*. (Online) <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=310725> (Diakses tanggal 16 Juni 2013)
- Parhah, Siti. 2009. *Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan Di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Koperasi ISSN : 1907-1698 Volume 4, Nomor 1, Juli 2009. (pinayani.wordpress.com/, diakses tanggal 13 Juni 2013)
- Prayitno, Hadi dan Budi Santosa, 1996. *Ekonomika Pembangunan*. Jakarta : Gahlia Indonesia
- Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto. 2001. *Distribusi Pendapatan Dalam Pembangunan*. Yogyakarta : Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.6. No.1, 2001, (journal.uui.ac.id/index.php/JEP/article/viewFile/657/581+&cd=2&hl=en&ct=clnk, diakses tanggal 18 Maret 2013)
- Suryana, 2000. *Ekonomika Pembangunan*. Jakarta : Salemba Empat
- Sutarno, dan Mudjarat kuncoro. 2000. *Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketidakmerataan Antar Kecamatan Di Kabupaten Banyumas, 1993-2000*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8 No. 2, Desember 2003 Hal: 97 – 110. (eprints.undip.ac.id/26414/2/JURNAL.pdf, diakses tanggal 22 Maret 2013)
- Syafrizal. 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketidakmerataan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Jakarta, : Buletin Prisma Vol.3 Maret 1997
- Tambunan, Tulus. 2006. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Gahlia Indonesia
- Todaro, Michael. P, 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta : Erlangga (Terjemahan)
- Wahyuni, Heni. 2004. *Is There A Link Between Increased Growth And Reduced Income Inequality? Analysis Of Cross-Country Studies*. Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 1, Nomor 1, Februari 2004 (<http://journal.uny.ac.id>, diakses tanggal 22 Maret 2013)
- Waluyo, Joko. 2004. *Hubungan Antara Tingkat Ketidakmerataan distribusi Pendapatan Dengan Pertumbuhan Ekonomi : Suatu Studi Lintas Negara*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 9 No. 1, Juni 2004. Hal: 1 – 20. (<http://journal.uui.ac.id>, diakses tanggal 23 Maret 2013)
- Yuliani, Maryam. 2011. *Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Distribusi Pendapatan. Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah 2007-2008*. (<http://eprints.undip.ac.id/15707/>, diakses tanggal 23 Maret 2013)
- Yustika, Ahmad Erani. 2008. *Ekonomi Kelembagaan, Definisi, Teori, dan Strategi*. Malang: Bayu Media.